**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03**

**LAPORAN OPERASIONAL DAN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

## 

## umum

### Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

### Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

### Manfaat Informasi Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
   1. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
   2. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
   3. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
   4. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
3. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Definisi

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
2. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. **Bantuan Keuangan** adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
4. **Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
5. **Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
6. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
7. **Beban Hibah** adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
9. **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
11. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
12. **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
13. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
14. **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
16. **Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
17. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
18. **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
19. **Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

### PERIODE PELAPORAN

1. Laporan operasional disajikan sekali dalam setahun dengan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

## STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
   1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
   2. cakupan entitas pelaporan;
   3. periode yang dicakup;
   4. mata uang pelaporan; dan
   5. satuan angka yang digunakan.
3. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
4. Pendapatan-LO
5. Beban
6. Surplus/Defisit dari Operasi
7. Kegiatan Non Operasional
8. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
9. Pos Luar Biasa
10. Surplus/Defisit-LO
11. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar.
12. Format Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas di tingkat entitas akuntansi (SKPD/PPKD) dan entitas pelaporan (Pemko Dumai) terlampir pada bagian akhir kebijakan ini.

### INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

### TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
4. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
5. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
6. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

**Format Laporan Operasional SKPD**

1. Contoh format Laporan Operasional SKPD adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**SKPD.........**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | **20x1** | **20x0** | **Kenaikan/**  **Penurunan** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) | (6)=(3)/(4) |
|  | **KEGIATAN OPERASIONAL** |  |  |  |  |
| **1** | **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.3 | Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yg Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah PAD** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BEBAN** |  |  |  |  |
| 2.1 | Beban Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2 | Beban Persediaan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.3 | Beban Barang dan Jasa (selain Beban Persediaan) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.4 | Beban Penyusutan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.5 | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Beban** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Surplus (Defisit) dari operasi: [1]-[2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** |  |  |  |  |
| 3.1 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah surplus/defisit sblm Pos Luar Biasa** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **POS LUAR BIASA** |  |  |  |  |
| 4.1 | Pendapatan Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4.2 | Beban Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Pos Luar Biasa** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Surplus/Defisit LO** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

**Format Laporan Operasional PPKD**

1. Contoh format Laporan Operasional PPKD adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**PPKD**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | | **20x1** | **20x0** | **Kenaikan/ Penurunan** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5)=(3)-(4) | (6)=(3)/(4) |
|  | **KEGIATAN OPERASIONAL** |  | |  |  |  |
| **1** | **PENDAPATAN** |  | |  |  |  |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** |  | |  |  |  |
| **1.2.1** | **Transfer Pem.Pusat-Dana Perimbangan** |  | |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil SDA | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Pem Pusat – Dana Perimbangan** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2.2** | **Transfer Pem Pusat Lainnya** |  | |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Dana Penyesuaian | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Pem.Pusat Lainnya** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 1.2.4 | **Transfer dari Pemda Lainya** |  | |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Transfer Bantuan Keuangan | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.3** | **Lain-Lain Pendapatan yang Sah** |  | |  |  |  |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | Xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.3. | Pendapatan Lainnya | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Lain-lain Pendpatan yang Sah** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  | |  |  |  |
| **2** | **BEBAN** |  | |  |  |  |
| 2.1 | Beban Bunga | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.2 | Beban Subsidi | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.3 | Beban Hibah | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.4 | Beban Bantuan Sosial | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.5 | Beban Tak Terduga | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.6 | Beban Transfer Bagi Hasil | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.7 | Beban Transfer Bantuan Keuangan | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.8 | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Beban** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Surplus (Defisit) dari operasi: [1]-[2]** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  | |  |  |  |
| **3** | **SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** |  | |  |  |  |
| 3.1 | Surplus dari Penjualan Aset Non Lacar | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 3.2 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 3.3 | Defisit dari Penjualan Aset Non Lacar | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 3.4 | Defisit Peyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah surplus/defisit sblm Pos Luar Biasa** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **4** | **POS LUAR BIASA** |  | |  |  |  |
| 4.1 | Pendapatan Luar Biasa | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 4.2 | Beban Luar Biasa | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Pos Luar Biasa** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  | |  |  |  |
|  | **Surplus/Defisit LO** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

**Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah**

1. Contoh format Laporan Operasional Pemerintah Daerah (Konsolidasian) adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | | **20x1** | **20x0** | **Kenaikan/ Penurunan** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5)=(3)-(4) | (6)=(3)/(4) |
|  | **KEGIATAN OPERASIONAL** |  | |  |  |  |
| **1** | **PENDAPATAN** |  | |  |  |  |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** |  | |  |  |  |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yg Sah | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah PAD** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** |  | |  |  |  |
| **1.2.1** | **Transfer Pem.Pusat-Dana Perimbangan** |  | |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil SDA | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2.2** | **Transfer Pem Pusat Lainnya** |  | |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | J**umlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2.3** | **TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI** |  | |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya |  | |  |  |  |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.3** | **Lain-Lain Pendapatan yang Sah** |  | |  |  |  |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.3. | Pendapatan Lainnya | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Lain-lain Pendpatan yang Sah** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  | |  |  |  |
| **2** | **BEBAN** |  | |  |  |  |
| 2.1 | Beban Pegawai | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.2 | Beban Persediaan | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.3 | Beban Jasa | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.4 | Beban Pemeliharaan | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.5 | Beban Perjalanan Dinas | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.6 | Beban Bunga | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.7 | Beban Subsidi | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.8 | Beban Hibah | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.9 | Beban Bantuan Sosial | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.10 | Beban Penyusutan | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.11 | Beban Transfer | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 2.12 | Beban Lain-lain |  | |  |  |  |
|  | **Jumlah Beban** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Surplus (Defisit) dari operasi: [1]-[2]** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  | |  |  |  |
| **3** | **SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** |  | |  |  |  |
| 3.1 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 3.2 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 3.3 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 3.4 | Defisit Peyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 3.5 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah surplus/defisit sblm Pos Luar Biasa** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **4** | **POS LUAR BIASA** |  | |  |  |  |
| 4.1 | Pendapatan Luar Biasa | xxx | | xxx | xxx | xxx |
| 4.2 | Beban Luar Biasa | xxx | | xxx | xxx | xxx |
|  | **Pos Luar Biasa** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  | |  |  |  |
|  | **Surplus/Defisit LO** | **xxx** | | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**SKPD……./PPKD/.........**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **20x1** | **20x0** |
| 1 | Ekuitas Awal | xxx | Xxx |
| 2 | Surplus/Defisit LO | xxx | Xxx |
| 3 | **Jumlah Ekuitas Akhir sebelum Dampak Kumulatif: (1) + (2)** | **xxx** | **xxx** |
| 4 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: |  |  |
| 4.1 | Koreksi nilai persediaan | xxx | Xxx |
| 4.2 | Selisih revaluasi aset tetap | xxx | Xxx |
| 4.3 | Lain-lain | xxx | Xxx |
|  | **Jumlah Dampak Kumulatif (4.1 + 4.2 + 4.3)** | **xxx** | **xxx** |
| 5 | **Ekuitas Akhir (3) + (4)** | **xxx** | **Xxx** |